

MEMBUMIKAN ETIKA POLITIK ISLAM NABI MUHAMMAD SAW PERIODE MADINAH DALAM KONTEKS PERPOLITIKAN INDONESIA

Suwanto* & Rahmat Hidayat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Abstract

Today, the massive political elite is waging negative political propaganda in both the real and virtual worlds. The problem is, excessive political ambition often justifies any means to achieve political goals, such as with money politics, hoaxes, and hatespeech. This unethical politics has an impact on social instability that creates conflict in society. In addition, political machiavelism fosters public morality and tarnishes political ethics that is upheld by Pancasila and Islamic teachings. The study of this article is qualitative-descriptive with an interconnected-interconnected historical approach. This study seeks to explore the ethical values of the Prophet Muhammad SAW during the Medina period in the Indonesian political year by reflecting the values of the leadership of the Prophet Muhammad in the Medina Period, such as Ukhuwah Islamiah, unity, deliberation, at-Ta'awun, and justice. The actualization of the values of Islamic political ethics is certainly very relevant in order to create a healthy, clean and polite democratic life. That is, the political ethics of the Prophet Muhammad in the Medina period can be emulated in the sphere of national politics towards civil society upholding unity in diversity.

Keywords: Islamic political ethic, Indonesian politic.

Abstrak

Dewasa ini, para elite politis massif melancarkan propaganda politik negatif baik di dunia nyata maupun maya. Persoalannya, ambisi politik yang berlebihan seringkali menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik, seperti dengan *money politic*, *hoax*, dan *hate speech*. Berpolitik yang tidak etis ini berdampak pada instabilitas sosial yang menuai konflik dalam masyarakat. Selain itu, Machiavelisme politik menumbalkan moralitas publik dan mencoreng etika politik yang dijunjung tinggi oleh Pancasila dan ajaran Islam. Studi artikel ini yaitu kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sejarah yang diintegrasikan-interkoneksi. Studi ini berusaha mengeksplorasi nilai etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madinah di tahun politik Indonesia yaitu dengan merefleksikan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Periode Madinah, seperti Ukhuwah Islamiah, persatuan, musyawarah, at-Ta'awun, dan keadilan. Aktualisasi nilai-nilai etika politik Islam ini tentu sangat relevan guna mewujudkan kehidupan demokratis yang sehat, bersih, dan santun. Artinya, etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madinah dapat diteladani dalam lingkup perpolitikan nasional menuju masyarakat madani menjunjung persatuan-kesatuan dalam kebhinnekaan.

Kata Kunci: Etika politik Islam, politik Indonesia.

PENDAHULUAN

Narasi besar sejarah umat Islam mencatat bahwa Muhammad hijrah ke Yastrib pada 622 M. Perintah eksodus Muhammad dari Mekkah ke Yastrib dilatarbelakangi oleh dua faktor utama. Pertama, besarnya siksaan dan penganiayaan kaum Quraisy kepada Muhammad SAW dan pengikutnya. Kedua, permintaan suku Yastrib kepada Muhammad SAW untuk menjadi mediator/penengah atas konflik kesukuan yang tidak berkesudahan sekaligus menjadi pemimpin masyarakat Yastrib yang majemuk. Sistem sosio-politik masyarakat Yastrib saat itu tidak terpusat pada tangan seseorang melainkan terdesentralisasi pada kepala suku yang disebut *sayyid* yang merepresentasikan orang-orang terkemuka dari setiap suku (Watt, 1988: 30).

Hijrah Muhammad SAW ke Yastrib merupakan episode awal dari kegiatan politiknya yang menjadi titik mulai pesatnya penyebaran ajaran Islam di Jazirah Arab. Kesuksesan ini disebabkan dukungan dan kepercayaan penduduk Yastrib kepada Nabi

*Correspondance Author: awanayip@gmail.com

Article History | Submitted: May 20, 2019 | Accepted: December 23, 2019 | Published: January 5, 2020

How to Cite (APA 6th Edition style):

Suwanto & Rahmat Hidayat. (2020). Membumikan Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW Periode Madinah dalam Konteks Perpolitikan Indonesia. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 3(2), 124-141.

DOI: [10.30829/juspi.v3i2.4469](https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.4469)

Muhammad SAW yang memintanya menjadi pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Yastrib kala itu sudah menjelma masyarakat yang multikultural. Wilayah yang terletak di sebelah utara kota Mekkah ini dihuni oleh beragama suku dan agama di antaranya Yahudi, Nasrani, dan kaum Pagan.

Nabi Muhammad SAW merupakan peletak dasar sistem kemasyarakatan yang berlandaskan pada universalisme Islam. Kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik Madinah berperan besar untuk menggantikan pertalian kesukuan (nasab) dengan pertalian spiritual (*ummah*) (Misrawi, 2009: 306). Nabi Muhammad SAW menciptakan komunitas baru yang disebut *ummah*, sebuah sistem komunitas persaudaraan yang mengintegrasikan individu-individu, klan, kota dan kelompok-kelompok etnik dalam sebuah loyalitas keagamaan (Lapidus, 2000: 51). Piagam Madinah direpresentasikan sebagai konsensus kolektif penduduk Madinah yang mengingat mereka dalam ikrar untuk hidup berdampingan secara damai, saling tolong-menolong, saling menghargai, serta berkomitmen untuk menjaga keamanan dan juga kedamaian negeri dari ancaman luar.

Mengingat kekejaman Quraisy terhadap umat muslim tidak akan pernah usai sekalipun Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya telah pergi meninggalkan kota kelahirannya. Kebencian suku Quraisy semakin membara terhadap umat Islam disebabkan Nabi Muhammad SAW mendapat dukungan positif dari masyarakat Yastrib yang memiliki dampak besar bagi kekuatan Islam. Para elite Quraisy di Mekkah memandang umat Islam di Madinah sebagai ancaman serius bagi eksistensi dan elektabilitas suku Quraisy di Mekkah. Kekuatan Islam di Madinah dibuktikan dengan keberhasilan Muhammad dalam membebaskan kota Mekkah pada 630 M melalui peperangan tidak berdarah yang dikenal dengan *fathu mekkah*.

Selama kurun waktu sepuluh tahun Nabi Muhammad berhasil membangun sebuah peradaban Islam di Madinah dan bahkan Islam dapat tersebar dengan damai sampai ke wilayah Syam dan Afrika Utara yaitu Ethiopia. Keberhasilan yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW tidak dapat dilepas kepiawaiannya dalam berpolitik ditambah lagi ia dikenal sangat bijaksana dan berbudi luhur dalam menghadapi beragam persoalan baik di ranah agama, sosial, maupun aspek politik. Sebagai pemimpin politik di Madinah, Nabi Muhammad SAW mampu memberikan teladan yang baik kepada rakyatnya.

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sangat berpegang teguh kepada Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Nilai-nilai sosial dan politik dalam Piagam Madinah berpijak pada prinsip universalisme Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Di sisi lain, Piagam Madinah sebagai konsensus politik kolektif yang lahir dari kondisi sosio-kultural masyarakat Madinah yang majemuk. Seluruh pihak (penduduk madinah yang majemuk) yang terlibat dalam konsensus politik tersebut disebut sebagai *ummatun wahidah*, tidak peduli apa latar belakang agama dan ras mereka.

Pandangan Syafi'i Ma'arif, apa yang termaktub dalam konstitusi Madinah merupakan penguraian dari nilai-nilai kemasyarakatan yang terkandung dalam Al-Qur'an (1995: 19). Maka secara substansi, piagam Madinah merupakan ejawantah ajaran-ajaran sosial-politik Al-Qur'an. Menurut Zuhairi Misrawi, legalisasi Piagam

Madinah merupakan upaya konstitusional yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membangun sebuah masyarakat baru yang bebas dari fanatisme kesukuan yang disebut umat. Nafas baru masyarakat Madinah selalu menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, perdamaian, *ukhuwah islamiyah*, dan toleransi (Misrawi, 2009: 298). Nilai-nilai ini menghidupi sosio-kultural masyarakat Madinah yang majemuk dan menjadi landasan etika politik Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan kepemimpinan politik di Madinah dalam membentuk masyarakat yang aman dan damai.

Bingkai nilai-nilai tersebut, entitas Piagam Madinah membentuk karakter politik yang bersifat demokratis yang menolak segala tindakan pemerintahan yang otoriter. Prinsip musyawarah, amanah, transparansi, dan kejujuran dalam berpolitik menjadi strategi jitu Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat madani yang demokratis. Hal ini dibuktikan oleh Muhammad saat pertama kali hijrah ke Yastrib, ia melakukan dua hal. *Pertama*, mendirikan Masjid Nabawi sebagai tempat pertemuan dan permusyawaratan penduduk Yastrib yang majemuk dalam memecahkan berbagai persoalan. *Kedua*, mempersaudarakan kaum Muhajiriin dengan Ashar.

Kedua tindakan tersebut mengisyaratkan bahwa sejak mula Nabi Muhammad SAW menginjaki tanah Yastrib, beliau telah menghendaki kehidupan yang demokratis yang kemudian dituangkan dalam Piagam Madinah. Dari situ pula, fanatisme kesukuan tidak lagi menjadi landasan kehidupan baik sosial, budaya, maupun politik. Nabi Muhammad SAW mengikat penduduk Madinah dalam sebuah ikatan spiritual yang mengindahkan persatuan, perdamaian, dan kasih sayang. Fanastime kesukuan yang selama ini menjadi basis sosio-kultural dan sosio-politik penduduk Yastrib hanya menjerumuskan mereka ke dalam konflik, permusuhan dan perpecahan yang panjang dan menjadi penghalang bagi proses keadaban dan keperadaban Kota Yastrib.

Narasi perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin dan membangun Kota Madinah mengandung nilai-nilai etika politik yang ideal dan relevan untuk diaktualisasikan dalam konteks tahun politik di Indonesia. Kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW di Madinah selalu mengedepankan keadilan, toleransi, persaudaraan, musyawarah, tanggungjawab (amanah), kejujuran, dan kemaslahatan umat. Orientasi politik yang didahulukan tersebut berlandaskan budi pekerti/akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW dalam membangun komunikasi politik dengan publik.

Mengingat cita-cita ideal Indonesia adalah menuju taraf masyarakat madani/*civil society*. Pada dasarnya idealitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab tersebut hanya lahir dari proses politik yang etis. Berpolitik dalam konteks kebangsaan adalah rangkaian berdemokrasi yang tidak dapat dilepaskan dari landasan etisnya yaitu adil, kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan akhlak (Dwihantoro, 2013: 13). Spirit dari etika politik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kemudian diaktualisasikan dalam perilaku politik yang berakhlak, toleran, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik dan tidak manipulatif.

Meskipun demikian, dalam realitas perpolitikan nasional, betapa banyak para elite politisi bersama partai politiknya masih *getol* melancarkan manuver politik baik di dunia nyata maupun maya. Permasalahannya, hawa nafsu kekuasaan yang berlebihan, membuat para politisi membabibuta dan menghalalkan segala cara demi kepentingan

golongannya. Tidak sedikit, para politisi melakukan *money politic*, membuat dan menyebarkan *hoax*, *hatespeech* serta melakukan korupsi uang negara hanya demi melakukan kampanye politik. Dampak dari sikap politik yang membabibuta ini akan melahirkan pemerintahan yang korup dan menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat. Kemaslahatan umum ditumbalkan demi kepentingan golongan.

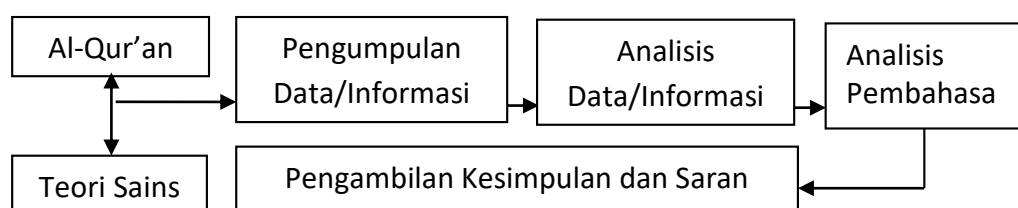
Praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di kalangan elite pejabat menjadi ancaman serius Pancasila serta melanggar ajaran Islam. Korupsi masih menjadi *extra ordinary crime* yang kian marak dilakukan pejabat. Tengok saja, Indeks Persepsi Korupsi Dunia, Indonesia pada 2015 masih menduduki urutan 88. Begitu pula indeks *rule of law* 2015, Indonesia berada di peringkat 52. Padahal Islam secara tegas mengharamkan praktik korupsi. Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 188 jelas-jelas melarang kita memakan harta bukan haknya dengan jalan yang batil. Ketika kita diberi amanah sebagai seorang pejabat atau pemimpin, maka kewajiban kita ialah menjaga amanah itu. Hal ini, diajarkan kepada kita dalam Q.S. Al-Mu'minun (23) ayat 8.

Merespon kecarut-marutan perpolitikan Indonesia pasca Pemilu 2019, maka kita perlu membumikan nilai-nilai etika politik Islam *ala* Nabi Muhammad SAW. Hal ini agar setiap aktivitas berpolitik dapat diselenggarakan secara adil, sehat, bersih, dan santun tanpa menumbalkan persatuan dan kerukunan bangsa. Dengan membumikan etika politik Islam diharapkan kehidupan berbangsa yang demokratis dan adil dapat terealisasikan, sehingga cita-cita masyarakat madani dapat diwujudkan bersama.

Berangkat dari latar belakang pemikiran tersebut, artikel ini ditulis berdasarkan tiga pokok pembahasan. *Pertama*, bagaimana peran Nabi Muhammad SAW memimpin dan membangun masyarakat Madinah. *Kedua*, nilai-nilai etika politik Islam apa saja yang melandasi kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW selama di Madinah. *Ketiga*, bagaimana relevansi etika politik Islam dalam pencatutan politik nasional di Indonesia.

METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Jenis penulisan karya tulis ini ialah eksploratif yang bersifat kualitatif-deskriptif dan bercorak *pure research* (penelitian murni) dengan pendekatan sejarah, yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka memperluas serta memperdalam pengetahuan secara teoritis berdasarkan kajian sejarah yang berkaitan dengan etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madina di tahun politik Indonesia tahun 2019 dengan pendekatan sejarah yang diintegrasikan-interkoneksi ke dalam fenomena sekarang.



Gambar 1 Tahapan Penulisan

Fokus penulisan karya tulis ini ialah mengintegrasikan-interkoneksi Al-Qur'an dan sains humaniora, dalam rangka mengeksplorasi nilai-nilai etika politik Nabi Muhammad SAW periode Madinah ke dalam politik Indonesia. Sumber data dalam penulisan ini berupa buku, majalah, jurnal ataupun dokumen sejenisnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian yakni terkait membumikan etika politik Nabi Muhammad SAW ke dalam tahun politik Indonesia. Teknik pengumpulan data memakai metode penulisan kepustakaan atau *library research* yang dikuatkan oleh kajian penelitian yang relevan. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan model *content analysis* dan hermeneutik, yaitu suatu analisis tekstual dalam studi pustaka melalui investigasi terhadap isi dalam berbagai literatur dan penelitian yang relevan, baik berupa teks wahyu maupun non-wahyu dengan pendekatan integrasi-interkoneksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Politik Islam

Supaya kita lebih memahami mengenai konsep etika politik Islam, perlu diketahui definisi dari dua kata yaitu etika dan politik. *Pertama*, etika secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*ethos*" yang memiliki banyak arti yaitu kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sementara itu, secara istilah, K. Bertens mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya (2000: 7).

Menurut John L. Esposito sebagaimana yang dikutip In'amuzzahidin menyatakan tentang fokus etika yang mengabstraksikan dan mengevaluasi alasan individu atau golongan tertentu yang menghakimi kepada mereka tentang benar-salah, atau baik-buruk yang biasanya berkaitan dengan perbuatan manusia (*human act*), sikap (*attitudes*) dan kepercayaan (*belief*) mereka. Etika seringkali dipahami sebagai refleksi filosofis tentang moral. Karenanya etika lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan yang puncaknya adalah kebijakan (2015: 91).

Adapun politik dalam bahasa Arab disebut dengan *al-siyâsah* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Secara terminologis, *siyâsah* adalah mengatur, memimpin dan mengarah manusia ke jalan maslahat atau jalan yang menyelamatkan. Dari kedua definisi kata tersebut dapat dipahami bahwa etika politik adalah serangkaian nilai-nilai yang menjadi pedoman setiap tindakan kepemimpinan dan kekuasaan agar mengarahkan dan menghantarkan manusia ke jalan keselamatan.

Etika politik memiliki tiga dimensi yaitu tujuan politik, yang berhubungan dengan masalah pilihan sarana dan aksi politik yang berhubungan dengan perilaku politikus. Maka dapat dipahami bahwa Etika politik Islam merupakan nilai-nilai akhlak politik yang bersumber dari wahyu kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, ketika realitas sosial muncul, legitimasi atas realitas itu pun harus jelas dalam etika politik Islam (Sofyan, 2012: 22).

Kepemimpinan Politik Nabi Muhammad SAW di Madinah

Umat Islam mengawali hidup bernegara pasca hijrah Nabi ke Madinah. Kota Nabi ini yang terletak di utara kota Mekkah mulanya dikenal dengan nama Yastrib. Sebelum Islam singgah di kota tersebut, Yastrib menjadi tempat tinggal beragam suku/bani dan beragam pemeluk agama. Beberapa nama suku diantaranya Aus, Khazraj, Saidah, an-Najjar, Quraidzah, Qainuqa', Nadlir dan sebagainya. Tidak hanya itu, Yastrib juga dihuni oleh kaum Nasrani, Yahudi, dan Pagan sekalipun ketiga pemeluk agama tersebut terklasifikasi berdasarkan kesukuan.

Nilai-nilai kesukuan mendasari dan membentuk kehidupan sosial masyarakat Yastrib. Fanatisme kesukuan berlebihan telah menyeret penduduk lokal Yastrib ke dalam permusuhan yang sengit dan anarkis antar kelompok terpendang (Lapidus, 2000: 38). Konflik tersebut tidak lepas dari ambisi politik untuk mendominasi kekuasaan di Yastrib. Misalnya, pertikaian panjang antara suku Aus dengan suku Khazraj. Hampir setiap hari, kehidupan sosial masyarakat Yastrib disesaki dengan konflik berbau kesukuan sehingga ini berdampak pada kemerosotan moralitas penduduk Yastrib.

Konflik kesukuan yang panjang dan tidak berkesudahan ini membuat mereka sadar perlunya sosok juru damai atau penengah antara keduanya. Penduduk Yastrib, khususnya suku Aus dan Khazraj mendengar bahwa di Mekkah terdapat sosok yang arif dan bijaksana. Pada musim haji tahun kesepuluh dari kenabian mereka datang menemui dan meminta Nabi agar menjadi mediator konflik kesukuan tersebut sekaligus menjadi pemimpin kota Yastrib.

Kemudian pada musim haji tahun berikutnya, dua belas orang penduduk Yastrib berikrar di hadapan Nabi Muhammad SAW memeluk Islam. Mereka juga berjanji tidak akan menyekutukan Allah SWT, tidak akan berzina dan tidak akan mengkhianati nabi. Peristiwa kemudian dikenal dengan Baiat Aqabah Pertama. Kemudian di musim haji berikutnya, dalam jumlah yang lebih besar lagi yaitu tujuh puluh tiga penduduk Yastrib menyatakan diri memeluk Islam di hadapan nabi. Peristiwa ini kemudian disebut dengan Baiat Aqabah Kedua. Kedua peristiwa penting menjadi titik mula dari perjalanan politik Nabi Muhammad SAW dalam membangun sebuah negara. Kedua baiat itu kemudian dianggap sebagai momentum politik bagi peletakan batu pertama bangunan sebuah Negara Madinah yang beradab (Sjadzali, 1990: 9).

Permintaan penduduk Yastrib tersebut semakin mengukuhkan niat Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya untuk melakukan hijrah ke Yastrib. Di tambah lagi siksaan, permusuhan suku Quraisy Mekkan menjadi salah satu alasan lain diperintahkan nabi untuk berhijrah ke Yastrib. Exodus ke kota Yastrib tersebut dilakukan secara diam-diam pada 621 M. Hijrah Nabi ke Yastrib ini kemudian dimaknai sebagai langkah perubahan dari kehidupan yang terpuruk menuju kehidupan yang lebih baik. Hijrah disini merupakan jalan perubahan kultur masyarakat Arab dari masyarakat berbasis kesukuan menuju masyarakat yang diikat oleh keyakinan agama.

Kalangan elite suku di Madinah melakukan kesepakatan politik dengan mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin politik Kota Madinah. Pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Kota Madinah merupakan representasi harapan mereka untuk mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut.

Konflik kesukuan telah membawa kehidupan penduduk Madinah ke dalam penderitaan. Di tengah penduduk Yastrib yang heterogen, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai pemimpin politik sekaligus juru damai/hakim (Watt, 1988:32). Nabi Muhammad SAW dipercaya sebagai utusan terakhir dari Tuhan yang kedatangannya membawa misi perdamaian di muka bumi. Paradigma ini membangun sebuah sugesti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang bijaksana. Oleh karena itu penduduk Yastrib menaruh harapan kepadanya agar menciptakan perdamaian dan keharmonisan.

Simpaty penduduk Yastrib kepada Nabi Muhammad SAW membentuk sikap sosial yang terbuka terhadap kaum Muhajirin. Misi kerasulan yang ditopang dengan kekuatan politis sebagai kepala negara membuat penyebaran ajaran Islam semakin mudah diterima masyarakat (Kosim, *Islamuna*, 2015: 8). Oleh karena itu Muhammad meletakkan pondasi-pondasi peradaban di Yastrib yang kemudian diberi nama Madinat al-Nabi yang berarti Kota Nabi.

Pemberian nama Madinah berasal dari kata tamaddun, yang artinya “peradaban”, “civilization”. Maka jika ditelaah secara etimologis kota Madinah merupakan “wadah peradaban yang sarat dengan kehidupan yang beradab, berkesopanan, berertika, tertib, teratur serta taat dengan hukum-hukum, norma-norma yang telah disepakati bersama. Kehidupan sosial yang berlandaskan pada spirit persaudaraan (*ukhūwwah islamiah*), toleransi dan egaliterianisme (Madjid, 1994: 113).

Berdasarkan penamaan itu kemudian startegi politik awal Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan penduduk Madinah yang multikultural. Persaudaraan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar diabadikan dalam Al-Qur’an, Q.S. Al-Hasyr ayat 9 yang artinya: “Dan orang-orang yang telah menepati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).”

Nabi Muhammad SAW menanamkan spirit *ukhuwah Islamiah* sebagai pengganti pondasi sosial masyarakat Yastrib yang beretoskan fanatisme kesukuan. Persaudaraan yang islami tidak dimaknai sebatas persaudaraan sesama umat muslim, akan tetapi persaudaraan yang meliputi semua elemen penduduk Madinah yang terikat janji dan ikrar setia kepada Nabi sebagai pemimpin politik. Spirit ini kemudian membentuk *ummah wahidah* (Misrawi, 2009: 306). Fakta historis ini menegaskan bahwa pluralisme menjadi landasan etika politik Nabi Muhammad SAW selama memimpin Madinah.

Nabi Muhammad SAW sebagai rasul utusan terakhir memiliki otoritas yang berlandaskan kepada kenabian/pemimpin agama sekaligus pemimpin politik. Dalam pengambilan keputusan politik dan memecahkan permasalahan, Nabi Muhammad SAW menerapkan musyawarah sebagai representasi otoritas kenabian dan kepemimpinannya. Al-Qur’an pun memerintahkan nabi agar bermusyawarah (Sjadzali, 1990: 16). Hal ini berarti tindakan-tindakan politik yang diperbuat nabi tidak dapat dilepaskan dari nilai etika politik Islam yang bersumber dari kitab suci Al-Qur’an. Kitab

suci menjadi landasan etis Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan aktivitas politiknya

Kemudian spirit pluralisme dan musyawarah ini dimaktubkan dalam Piagam Madinah. Jika dikaji secara historis, piagam tersebut merupakan konstitusi Islam pertama yang menghubungkan relasi Islam dengan politik. Dalam piagam ini termaktub konsensus seluruh penduduk Madinah berkomitmen untuk mendukung, menghargai dan saling bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis dan damai. Semua penduduk Madinah dituntut bersinergi membela Madinah dari serangan luar. Dari sinilah, penduduk Madinah memiliki kedaulatan bernegara.

Kabar berdaulatnya Islam di Madinah tidak menyurutkan permusuhan kaum Quraisy Mekkah dan bahkan menarik perhatian dua imperium besar yaitu Byzantium dan Persia. Karena itu pasca-hijrah, musuh-musuh Nabi Muhammad SAW semakin intens melancarkan penyerangan kepada penduduk muslim Madinah.

Kota Madinah yang masih berumur belia sangat rentan terhadap serangan-serangan militer yang datang dari luar. Kondisi yang genting ini, Nabi Muhammad SAW membutuhkan bangunan angkatan bersenjata untuk menghadapi ancaman dari luar demi melindungi kedaulatan rakyat dari tindakan kekerasan. Kemudian turun ayat perang melandasi tindakan politik Muhammad untuk memerintahkan pendudukan Madinah melakukan penyerangan ofensif. Hal ini menegaskan perintah berperang berangkat dari spirit nasionalisme membela negara dan masyarakat Madinah (Syam, *Kritis*, 2015: 166).

Sejarah Islam menjelaskan bahwa pengimplementasian Piagam Madinah dalam kehidupan sosio-politik masyarakat Madinah tidak selamanya berjalan mulus. Suku-suku Yahudi yang menetap di Madinah melakukan pengkhianatan atas janji yang dituliskan. Pada peristiwa Perang Khandaq (626 M), kaum Yahudi Madinah yaitu Bani Quraidzah dan Bani Qainuqa' bersekongkol dan bekerja sama dengan kaum Quraisy. Saat suku Quraisy melakukan pengepungan, kaum Yahudi menebarkan teror, ancaman dan ketakutan di tengah masyarakat Madinah. Pengkhianatan internal menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi kedaulatan suatu negara. Akibat dari pengkhianatan yang diperbuat suku Yahudi, mereka diusir dari kota Madinah dengan tidak terhormat.

Sekalipun pengusiran Yahudi dari Madinah terkesan politik balas dendam, akan tetapi apa yang diputuskan Muhammad berlandaskan pada menjaga kedaulatan hukum negara. Pengkhianatan-pengkhianatan dari dalam harus ditindak lanjuti secara tegas agar tidak menjadi api dalam sekam. Menurut A. Syalabi, kebijakan pengusiran ini dinilai tepat sebab umat Yahudi Madinah telah menghasut suku-suku Arab untuk menyerbu kota Madinah pada perang Khandaq dan mereka pula yang menebarkan teror di Kota Madinah saat pengepungan berlangsung (Syalabi, 2003: 122). Maka pengusiran mereka dari Madinah setimpal dengan apa yang mereka lakukan, hal ini juga demi menjadi menjaga stabilitas internal masyarakat Madanih yang tergolong masih belia dan rentan.

Puncak keberhasilan konsolidasi politik perdamaian yang didengungkan Nabi Muhammad SAW terjadi pada tahun 630 M/9 H. Seusai pembebasan kota Mekkah dari hegemoni kaum Quraisy dan peperangan Tabuk terjadi pendelegasian besar-besaran

dari segenap penjuru di Jazirah Arab yang disebut tahun perutusan. Kebijakan kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW di Madinah mengandung daya magnet yang menarik simpati bangsa Arab untuk berbondong-bondong datang ke Madinah memeluk Islam agar dapat hidup dalam naungan panji-panji Islam yang menegakkan keadilan dan persamaan.

Asas-asas Etika Politik Islam Nabi Muhammad SAW di Madinah

Membahas tentang kegiatan berpolitik maka ia tidak dapat dipisahkan dari etika politik. Budaya politik selalu merealisasikan pembinaan nilai-nilai normatif dan perwujudan cita-cita. Adapun cita-cita etika politik ialah terwujudnya ruang kebebasan berpendapat dan terbentuknya institusi pemerintahan yang adil. Sehubungan dengan etika politik Islam yang diimplementasikan dalam kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah, Mohammad Arkoun memandang bahwa pemerintahan politik yang dibangun nabi di Madinah adalah suatu puncak keberhasilan yang gilang-gemilang. Terwujudnya pemerintahan yang adil dan egaliter merupakan buah dari cita-cita etika politik Islam yang diterapkan Muhammad selama menjadi pemimpin politik di Madinah.

Realitas politik menunjukkan tidak sedikit praktek-praktek tidak terpuji dilakukan para politikus untuk mencapai tujuan politiknya. Praktik Machiavellisme politik yang menghalalkan segala cara telah melanggar asas-asas dari etika politik. Menurut Ibnu Khaldun sistem politik dengan kekuatannya dan juga otoritasnya yang besar harus berlandaskan prinsip-prinsip religius (etika) yang direfleksikan dari akhlak nabi dan dakwah kejujuran (Khaeron, 2013: 362).

Wilayah aktivitas politik ini kemudian mencakup bagaimana politisi membangun komunikasi politik yang etis dan beradab dengan publik. Dalam hal ini Islam memiliki prinsip-prinsip etis yang harus dibangun politisi saat berkomunikasi dengan publik baik lewat kampanye, penyuluhan, dan aktivitas politik lainnya. *Pertama*, prinsip tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa). Dalam kerangka kerja etis tauhid ini adalah berkampanye melawan fondasi materialistik dualisme yang menampilkan keinginan superioritas melalui kekayaan (Khaeron, 2013: 364). Prinsip ini sangat menentang tindakan *money politic* yang memonopoli suara rakyat dengan uang.

Prinsip *kedua* adalah *amr ma'ruf* dan *nahi munkar*. Prinsip ini mengajarkan gagasan tentang tanggung jawab individual dan kelompok (Khaeron, 2013: 364). Kaum muslim memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mencerdaskan generasi bangsa. Tanggung jawab ini tidak hanya sebatas pada individu tetapi kepada kelompok. Tanggung jawab membimbing, mengarahkan, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat melibatkan juga partai politik, institusi media baik *cyber media* dan konvensional.

Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* kaitannya dengan komunikasi politik adalah tuntutan kepada para elite politisi agar mengajak publik untuk saling menghargai perbedaan/keragaman pandangan politik. Selain itu, mengarahkan publik ke arah persatuan bangsa, jangan sampai para elite mengobok-obok persatuan bangsa dengan melancarkan propaganda negatif. Seringkali para elite politik memanfaatkan media massa untuk mengkonsolidasikan kepentingannya kepada rakyat. Oleh karena itu media massa sebagai corong aspirasi publik dan jembatan komunikasi penguasa dengan

masyarakat haruslah objektif dan tidak tendensius dalam menyajikan informasi berita. Media massa bertanggung jawab untuk memproduksi konten-konten politik yang bernada positif, mendidik, objektif, dan tidak provokatif. Penjejalan konten berita yang bergizi dan bebas kebohongan (*hoax*), akan terbangun nalar politik yang konstruktif.

Prinsip *ketiga* adalah keumatan. Komunitas *ummah* yang dibangun nabi di Madinah sebagai kerangka dasar dari kerja sama dalam kehidupan politik dan sosial penduduk Madinah (Lapidus, 2000: 51). Dalam komunitas tersebut, beragam suku dan agama dapat diakomodir dan mampu hidup secara berdampingan. Berdasarkan konsep umat ini, unsur-unsur yang berbau SARA tidak dapat diterima sebagai fundamen suatu masyarakat dan negara (Khaeron, 2013: 367). Fanatisme dan primordialisme yang lekat dengan unsur-unsur SARA hanya akan merusak nilai-nilai keumataan sebagai sistem sosial Islam yang menjunjung tinggi keadilan, persamaan dan hak asasi manusia.

Komunikasi politik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah komunikasi interkultural adalah unsur utama yang harus dibangun dan dirawat dalam meneguhkan visi keumatan (Khaeron, 2013: 367). Hal ini dapat dilihat bagaimana Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajiriin dengan kaum Anshar, muslim dan non-muslim, mendialogkan persoalan Madinah dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani kemudian membangun kesepatan dengan keduanya dalam Piagam Madinah. Etos musyawarah menjadi cara Nabi Muhammad SAW mencapai cita-cita etika politik islam yaitu mewujudkan kehidupan demokratis. Pembangunan masjid di awal kehidupan Nabi Muhammad SAW di Madinah tidak sekedar difungsikan sebagai ruang untuk ibadah saja, melainkan pula menjadi ruang publik untuk memecahkan persoalan keumatan.

Komunikasi interkultural ini membuka pintu interaksi dari segala arah, sehingga aspirasi yang menjadi kepentingan publik dapat diakomodir dalam setiap kebijakan yang diambil Nabi Muhammad SAW. Tidak jarang Nabi Muhammad SAW menerima saran ataupun pendapat para sahabatnya untuk mengambil suatu tindakan. Metode konsultatif ini membuat kemerdekaan dan kebebasan berekspresi di Madinah terjaga dengan baik. Di tambah lagi, sekat-sekat kesukuan (primordialisme) yang memasung komunikasi interkultural telah sirna digantikan dengan ikatan keumatan.

Dalam konteks Indonesia pasca-Pemilu 2019, semangat kebangsaan harus dihadirkan kembali ke ruang-ruang publik. Melihat gencar propaganda partai-partai politik yang berlaga dalam pemilu telah membentuk sekat-sekat dalam ruang publik. Misalnya, dalam penyebutan pendukung partai tertentu terdapat istilah kubu partai setan dan kubu partai Allah SWT, atau term lain yang sangat tidak manusiawi yaitu kubu cebong dengan kampret. Secara tersirat term-term tersebut mengandung unsur penghinaan yang dalam prinsip kebangsaan dan keumatan harus dihindari rangka merawat persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, dalam konteks tahun politik, spirit kebangsaan harus dipegang kokoh dan diimplementasi dalam setiap aktifitas politik supaya kita tidak lagi terjebak dalam fanatisme golongan yang berlebihan.

Upaya-upaya mempertahankan masyarakat Madinah yang majemuk, selama sepuluh tahun Nabi Muhammad SAW menanamkan prinsip-prinsip etis yang menjadi landasan pergerakan politiknya. Prinsip-prinsip ini bersumber dari ajaran Al-Quran

yaitu *al-musawamah* (persamaan), *at-tasamuh* (toleransi), *at-tasyawur* (musyawarah), *at-ta'awun* (tolong menolong) dan *al-adalah* (keadilan). Dari nilai-nilai inilah kemudian terbangun masyarakat Madinah yang harmonis dan berdaulat. Oleh karena itu, tidak heran apabila Nurcholis Madjid menyatakan Kota Madinah periode Nabi Muhammad SAW merupakan refleksi dari masyarakat madani atau *civil society* yang tumbuh dalam sejarah sosial umat Islam.

Aktualisasi Etika Politik Islam dalam Perpolitikan Nasional

Sudah sebulan yang lalu, Indonesia telah menunaikan hajatan pesta demokrasi pemilihan serentak 2019. Namun, persoalannya atmosfer sosial-politik Indonesia masih disesaki dengan beragam ujaran kebencian, hoax dan *body shamming* sebagai dampak dari konfrontasi pasca-pemilu. Para elit politisi Indonesia dan masyarakat Indonesia masih terjebak dalam arus pertentangan kepentingan politik. Akibatnya, perpolitikan Indonesia berada dalam kondisi yang tidak baik dan kehidupan demokrasi Pancasila yang senada dengan spirit etika politik Islam masih pada tahapan wacana semata.

Persoalannya, para elite politisi bangsa dewasa terjangkit penyakit krisis moral. Ambisi politik yang berlebihan membuat mereka membabi buta dalam melancarkan kampanye politiknya. Hawa nafsu kekuasaan ini menggerakkan mereka untuk berpolitik dengan menghalalkan segala cara. Berita kebohongan (*hoax*) diproduksi memanipulasi kebenaran agar publik dapat dikelabui oleh kepentingan politik golongannya. Narasi-narasi kebencian dibuat untuk menjatuhkan lawan politiknya dan mengadu domba publik. *Money politic* adalah cara mereka memanipulasi suara rakyat pun marak.

Beragama cara curang dan tidak etis di atas menunjukkan betapa bobrok moral para elite politisi hari ini. Apa yang mereka perbuat di atas telah menyalahi landasan etika politik Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, persatuan, dan keadilan. Cara-cara etika politik tersebut juga melanggar ajaran agama Islam. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa para politisi dewasa ini tidak membawa harapan rakyat banyak melainkan hanya kepentingan politik golongannya.

Di tengah perpolitikan yang penuh kemelut dan prahara, nilai-nilai etika politik Islam Nabi Muhammad SAW sangat relevan untuk diaktualisasikan dalam konteks perpolitikan hari ini Indonesia baik di tingkat nasional maupun regional. Karakter utama politik Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah mengedepankan keadilan dan kepentingan rakyat daripada golongan. Kesejahteraan rakyat hanya akan dapat terwujud apabila keadilan dan hak asasi manusia ditegakkan. Kepentingan kepertaian memanipulasi kepentingan rakyat lewat slogan-slogan palsu yang menjadi pemanis bibir saja.

Kemudian, akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membangun komunikasi dengan rakyat. Kaitannya dengan komunikasi politik hari ini, tidak sedikit para oknum politisi menggelar kampanye hitam dengan menyebarkan *hoax* dan beragam ujaran kebencian yang sarat dengan fitnah, persekusi golongan, dan intimidasi. Banalitas kampanye politik hanya akan menimbulkan konflik horizontal dalam tubuh masyarakat kita.

Aktivitas politik yang berintegritas bagi persatuan bangsa hanya dapat diwujudkan lewat kampanye politik yang beradab. Kejujuran dan kesantunan harus menjadi prinsip dasar dari penyelenggaraan kampanye. Komunikasi politik yang dibangun lewat kampanye harus bermodelkan komunikasi interkultural tidak hanya melibatkan para pendukung golongannya. Meneguhkan integritas kebangsaan harus menjadi visi dari kampanye yang santun dan beradab.

Ajaran Etika Nabi Muhammad SAW tentang Toleransi

Salah satu amalan sikap yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila ialah sikap toleransi. Sejatinya, nilai-nilai toleransi justru dibawa oleh Islam. Toleransi dalam terminologi Islam biasanya disebut *tasamuh* yang bermakna “sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf”. Sementara, dalam definisi lain, *tasamuh* yaitu sikap akhlak terpuji dalam pergaulan dimana terdapat saling menghargai dan menghormati antara sesama sesuai dengan ajaran atau syariat Islam.

Jauh sebelum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menggagas *Declaration of Human Rights* atau Hak Asasi Manusia, Islam telah lebih dahulu mengajarkan jaminan kebebasan beragama melalui Piagam Madinah (622 M). Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar sikap toleransi antar umat beragama, dengan mengakui eksistensi non-muslim dan menghormati peribadatan mereka.

Bahkan untuk menciptakan aman dan damai, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan atau kebebasan tiap golongan untuk mermeluk dan menjalankan agamanya sesuai keyakinan masing-masing, tanpa adanya paksaan atau tekanan.

Adapun secara ringkas isi dari perjanjian antara Rasulullah SAW dengan kaum Yahudi di antaranya: kaum Yahudi hidup damai dengan kaum Muslimin; baik kaum Yahudi maupun Muslimin bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing; kedua belah pihak wajib saling tolong menolong; Kota Madinah merupakan kota suci yang wajib dijaga kedamaiannya; apabila terjadi perselisihan antara orang Yahudi dengan Muslimin, maka urusan itu hendaknya diserahkan kepada Rasulullah; serta baik itu kaum Muslimin maupun Yahudi mempunyai hak dilindungi keamanan dan kedamaiannya secara adil.

Sekelumit Shirah Nabawiyah tersebut tentu dapat dijadikan cermin dalam konteks ke-Indonesian. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara heterogen yang terdiri dari berabagai macam suku, ras, bahasa, dan agama. Tanpa ikatan persaudaraan dan toleransi yang kuat maka, bangsa ini mudah terpecah belah. Bahkan kita tahu bahwa sedari awal para *fouding father* mendirikan bangsa ini atas dasar ‘Bhineka Tunggal Ika’, walau berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan mulia ini tentu harus kita jaga dan kuatkan bukan malah kita rusak.

Islam telah telah jelas dan nyata mengajarkan toleransi antarumat beragama. Menurut Amin Rais, sesungguhnya toleransi dan kemajemukan telah diajarkan secara baku di dalam Al-Qur’an. Memang Al-Qur’an mengatakan hanya agama Islam yang diakui di sisi Allah SWT, tetapi koeksistensi atau hidup berdampingan secara damai antarumat beragama juga sangat jelas diajarkan melalui ayat, “*lakum dinukum*

waliyadin” (bagiku agamaku dan bagimu agamamu). Dalam istilah yang lebih teknis, *wishfull coexistent among religious*, yang berarti hidup berdamai antar umat beragama di muka bumi, meskipun berbeda-beda ragam bangsa.

Lebih lanjut Amin Rais juga berujar dalam pertemuan dengan mahasiswa ETH Zurich yang difasilitasi KBRI Bern dan International Relations and Security Network (ISN), bahwa bangsa yang kuat dengan dilandasi oleh adanya keinginan hidup bersama pada akhirnya melahirkan toleransi. Namun, kata toleransi ini yang mungkin terkesan mudah diucapkan. Kenyataannya implementasi di lapangan di kalangan masyarakat yang heterogen tampaknya tidak semudah bak membalikkan telapak tangan. Apalagi bagi masyarakat yang cenderung mengedepankan emosi manakala menyerempet masalah perbedaan keyakinan. Meskipun demikian bukan berarti tidak mungkin diterapkan dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Masyarakat sudah seharusnya sadar, bahwa kita harus hidup rukun. Mereka harus memiliki dorongan hasrat kolektif untuk bersatu padu. Karena sejatinya, sikap toleransi merupakan ciri kepribadian luhur bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita pupuk. Demikian juga Islam mengajarkan untuk toleransi dan juga hidup rukun, meski dengan pemeluk agama yang berbeda.

Integrasi-Interkoneksi Moderasi Islam dan Pancasila dalam Politik Indonesia

Integrasi-interkoneksi ialah suatu paradigma yang digagas dan dipelopori oleh Amin Abdullah, yang mencoba memecahkan kebuntuan berbagai problem kekinian (Siswanto, 2013). Paradigma integrasi-interkoneksi merupakan upaya mempertemukan kembali antara ilmu ke-Islaman (*Islamic science*) dengan ilmu umum (*modern science*), dengan harapan tercapainya kesatuan ilmu.

Al-Qur’an merupakan firman Allah SWT yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, yang kemudian dijadikan pedoman hidup (*way of life*) kaum muslim. Di dalamnya terkandung ajaran dan nilai-nilai pokok yang harus dijadikan rujukan utama (*absolute reference frame*). Namun, dewasa ini ada beberapa pihak yang berasumsi keliru bahwa ber-Islam berarti anti-Pancasila. Padahal keduanya saling mendukung dan menguatkan. Buktinya ialah sebagai berikut.

Konsep Islam moderat atau *al-wasatiyyah* merupakan salah satu konsep yang ditemukan dalam epistemologi Islam. Ada sejumlah terminologi *al-wasatiyyah*, sebagaimana dalam literatur Inggris seperti *moderation, mainstream, intermediacy, middle path, midpoint, reasonable, rational, common, and acceptable* (Dorloh dan Yusuf, 2015). Berdasarkan definisi *al-wasatiyyah* dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *wasat* dan kemudian diuraikan dari kata *ummatan wasatan* yang berarti tengah. Sementara itu, dalam referensi lainnya menjelaskan bahwa secara umum kata *wasatiyyah* dalam lexicon bahasa Arab yang merujuk pada beberapa arti seperti *al-adl, al-fadl, al-khairiyyah* dan *al-bainiyyah* (Islam & Khatun, 2015). Konsep ini memandang sesuatu hal secara adil dan seimbang. Moderasi Islam bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai tindakan ekstrim dan fanatik dalam segala aspek kehidupan manusia (Hanapi, 2014). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143. Integrasi-interkoneksi moderasi Islam dan Pancasila dalam etika politik sebagai berikut.

Sila Pertama

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satu inti dari ajaran Islam (*la ilaha ilallah*). Perwujudan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan dari bentuk fisik yaitu tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan peribadatan lainnya. Dalam bentuk non-fisik yaitu pengucapan kalimat syahadat setiap sholat lima waktu, khitan, pernikahan, dan sebagainya dilihat keselarasan sila pertama dengan ajaran inti Islam. Ajaran Islam untuk berimtak kepada Tuhan, sebagaimana Q.S. Al-Ikhlas (112): 1-4, Al-Baqarah (2): 1-5 dan 163, serta Al-A'raf (7): 59 dan 102.

Kerukunan antar umat beragama pun terjaga dengan baik. Di mana Islam masuk ke Indonesia tidak dengan pedang tapi lewat perdagangan yang akhirnya terjadi akulturasi budaya. Perwujudan itu dapat kita saksikan di beberapa daerah terjalin keselarasan dari tiga kekuatan yaitu sosial politik dan tradisional di mana kraton sebagai pusat pemerintahan, masjid sebagai pusat ibadah, dan lapangan sebagai tempat prajurit berlatih dan masyarakat berekreasi. Semuanya, berjalan dengan suasana rukun dan damai, serta saling menghormati. Hal ini selaras dengan ajaran Islam dalam Q.S. Asy-Syura (26): 15 dan Ali Imran (3): 64.

Islam juga mengajarkan tentang toleransi antar umat beragama, yang mana harus saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana Q.S Al-Kafirun (109): 6 dan Al-An'am (6): 108. Kemudian pula tidak memaksakan agama kepada orang lain, sebagaimana Q.S. Al-Baqarah (2): 256, Yunus (10): 90, Al-Kahfi (18): 29, dan Al-Maidah (5): 105.

Sila Kedua

Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat bagaimana Islam percaya Allah SWT menilai manusia bukan dari ras, golongan, suku, atau bangsa tapi dari tingkat ketakwaannya. Islam mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia sebagaimana Q.S. Al-Hujurat (49): 13. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, di dalam Q.S. An-Nisa (4): 135, serta mengembangkan sikap tenggang rasa, pada Q.S. Al-Hujurat (49): 12.

Penghargaan dan sikap hormat bukan hanya ditujukan pada orang Islam saja, akan tetapi pada seluruh manusia tanpa terkecuali. Hal ini tercermin sikap Rasulullah SAW saat ada jenazah yang lewat beliau berhenti dan menepi sebagai bentuk penghormatan tanpa tanya apa agamanya. Sikap saling menghormati dan mau bekerja dengan bangsa lain selaras dengan Q.S. Al-Baqarah (2): 213.

Sila Ketiga

Para pemimpin Islam di saat ikut merumuskan Pancasila dan mengesahkan Undang-Undang 1945 mereka mementingkan persatuan Indonesia bukan Islam. Karena Islam mengajarkan agar patuh kepada Allah SWT, rasul-Nya dan *ulil amri*. Dalam hal ini, pemerintah berarti *ulil amri* selama pemerintah tidak memaksa untuk berbuat maksiat, sehingga umat Islam dapat menerima Pancasila sebagai landasan negara yang

mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini, sesuai dengan ajaran yang termaktub dalam Q.S. Ali Imran (3): 103 dan Al-Anfal (8): 46.

Kita bangsa Indonesia juga harus mengukuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, sebagaimana hadist yang artinya "*cinta tanah air adalah sebagian dari iman*". Makanya, kita wajib rela berkorban untuk kepentingan Indonesia, seperti halnya ajaran dalam Q.S. Ali Imran (3): 92 dan Al-Hasyr (59): 9. Hal itu dalam rangka memajukan pergaulan untuk persatuan dan kesatuan bangsa, sebagaimana diajarkan dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 13.

Sila Keempat

Sikap gotong royong dan musyawarah telah menjadi budaya di Indonesia sejak zaman dahulu sampai Islam masuk ke Indonesia. Islam tidak menghapus budaya tersebut tapi mengakulturasikannya dengan ajaran Islam. Ajaran tersebut di antaranya tentang kedudukan manusia yang sama sederajat (Q.S. Ali Imran [3]: 70 dan Al-Hujurat [49]: 13). Musyawarah untuk menyelesaikan masalah bersama (Q.S. Asy-Syura [42]: 38 dan Ali-Imran [3]: 159). Menerapkan hasil musyawarah dengan perasaan senang dan penuh tanggung jawab (Q.S. Ali Imran [3]: 159), serta pertanggungjawaban secara moral terhadap keputusan (Q.S. Al-Isra' [17]).

Sila Kelima

Islam mengenal konsep keadilan dan kebijaksanaan dimana keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan semua makhluk. Keadilan dan kebijaksanaan tersebut bukan hanya berlaku untuk sesama muslim saja tapi kepada siapa saja, bahkan juga makhluk lainnya. Hal ini senada dengan ajaran Q.S. Al-Maidah (5): 8.

Akhirnya sampai pada titik kesimpulan bahwa negara Indonesia dibentuk dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Bangsa ini ada karena perbedaan. Dalam menyikapi perbedaan itu, kita sebagai bagian bangsa Indonesia, harus menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan, mewujudkan perdamaian serta kemajuan negara. Semua cita-cita tersebut dapat terlaksana, apabila seluruh elemen bangsa menguatkan ukhuwah untuk bersama-sama membangun Indonesia, sebagaimana diajarkan Q.S. An-Nahl (16): 97 dan juga Al-Maidah (5): 2. *Wallahu a'lam bish-shawaab*.

Aktualisasi Jurnalisme Profetik 4.0 guna Politik Damai

Era Digital memberi paradigma baru dalam dunia pers. Seirama dengan denyut nadi kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pers mengalami arah baru perkembangan yang demikian cepat. Ledakan informasi di dunia maya khususnya saat ini begitu masif dan sulit dikendalikan. Rubin (2004) menyebutkan bahwa ada beberapa istilah sebagai refleksi dari pesatnya kemajuan dan pertumbuhan teknologi informasi pada zaman sekarang ini, yaitu ledakan informasi (*information explosion*), banjir informasi (*flood of information*), pengeboman oleh informasi (*bombarded by information*), dan kelebihan informasi (*information overload*). Hal tersebut juga tidak lepas dari derasnyanya arus informasi, sehingga informasi yang ada melebihi taraf kebutuhan masyarakat (Rodin, 2014).

Informasi yang membludak di dunia maya tentu sangat menguntungkan bagi kita yang ingin mengetahui banyak hal dengan mudah. Namun, di sisi lain ada bahaya yang mengincar pada kondisi yang bersamaan, yaitu mudahnya terjadi penyebaran berita dan informasi bohong atau yang sering kita sebut sebagai *hoax*. Bahkan orang terpelajar sekalipun sulit membedakan mana berita yang benar dan mana yang *hoax*. Penyebaran tanpa dikoreksi maupun dipilah, pada akhirnya akan berdampak pada informasi *hoax*-pun dapat memecah belah publik (Rahadi, 2017).

Hadirnya informasi *hoax* di jagat maya khususnya tentu mengancam sirkulasi informasi di ruang virtual menjadi tidak sehat. Saat ini, **rentan** terjadi fenomena kebenaran diambil alih oleh berita-berita bohong. celaknya bangsa Indonesia seringkali mudah termakan berita *hoax*. Hal ini terbukti mengingat Indeks kebebasan pers AS dan Inggris turun, sedangkan di Indonesia menempati peringkat ke-124 dari 180 negara. Organisasi Wartawan Lintas Batas (RSF) mengingatkan adanya ancaman terhadap kebebasan pers akibat berita-berita bohong. Apalagi, menjelang Pilpres 2019 saat ini, berita bohong seringkali dijadikan sebagai senjata politik.

Ketua Satuan Tugas Multimedia Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Sulistyو Pudo mengutip hasil penelitian pakar teknologi informasi Pratama Persada menyebutkan informasi *hoax* sudah mencakup 60 persen dari konten media sosial di Indonesia. Informasi palsu, bohong atau pelintiran yang dimaksud terdiri dari gradasi kandungan informasi bohong yang bervariasi, baik 100 persen, 60 persen, atau 50 persen (Kompas, 18 Januari 2017).

Merespon berbagai persoalan tersebut tentunya pers sebagai salah satu entitas yang terlibat langsung tentu jangan tinggal diam, perlu adanya gerakan atau inovasi dalam menghadapi *hoax*. Perlu diperhatikan, dalam konteks kebenaran terhadap informasi dan komunikasi yang dibangun pers seringkali terjadi bias. Maka terjadilah apa yang dikatakan ambiguitas dalam laporan pers. Berkaitan dengan hal itu, pernyataan Bill Kovach dan Rosentiel bahwa masyarakat butuh prosedur dan proses guna mendapatkan apa yang disebut dengan kebenaran fungsional. Menurut pandangan Franz Magnis Suseno, bahwa pers boleh memiliki pelbagai tujuan dan harapan, tetapi tujuan dan harapan itu tidak boleh dikejar dengan menyampingkan kebenaran. Apapun yang disajikan pers harus benar; dan pers harus merasa terlibat terhadap kebenaran.

Berkaitan dengan hal ini, menjunjung kebenaran semakin dapat dilakukan oleh seorang jurnalis muslim jika menerapkan jurnalisme profetik atau jurnalisme kenabian atau *prophetic journalism*. Menurut Muhtadiah (2018) jurnalisme profetik adalah jurnalisme yang mengemban tugas kenabian, yakni menyampaikan risalah yang bermanfaat untuk semua orang berdasar cinta sebagai ibadah kepada Allah SWT dengan cara: Mengungkapkan kebenaran (*truth*), menegakkan keadilan (*justice*), mendukung terciptanya kesejahteraan (*prosperity*), menciptakan perdamaian (*peace*), menjunjung tinggi kemanusiaan universal (*universal humanity*).

Jurnalisme profetik relevan dengan jurnalisme Islami yakni jurnalisme yang meneladani empat kode etik Nabi Muhammad SAW yang ternyata sesuai dengan fungsi media, yakni *shiddiq* (menyampaikan, *to inform*), *amanah* (mendidik, *to educate*),

tabligh (menghibur, *to entertain*), dan *fathanah* (melakukan kontrol sosial, *social kontrol*). Keempatnya juga bisa diartikan: *shiddiq* (berdasar kebenaran), *tabligh* (disampaikan dengan cara mendidik), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (dengan penuh kearifan).

Oleh karena itu, jurnalisme profetik 4.0 sangat diperlukan Indonesia di era digital, ketika kebebasan berekspresi dapat dilakukan dengan sangat cepat dan menjangkau seluruh jagat oleh siapa pun hampir tanpa batas terkait kemajuan teknologi informasi dengan segala dampak positif dan terutama negatifnya, termasuk penyebaran *hoax*. Harapannya informasi yang ada di ruang-ruang digital adalah informasi yang sehat, sejuk, dan damai bebas dari *hoax* dan ujaran kebencian.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa etika politik Islam Nabi Muhammad SAW selalu mengedepankan integritas keumatan. Artinya, semua aktivitas politiknya selama di Madinah berorientasi pada keadilan, persatuan, dan kepentingan umum daripada kepentingan golongannya. Selain itu, etika politik Nabi Muhammad SAW mengedepankan prinsip sopan santun, musyawarah, dan kejujuran saat berkomunikasi dengan rakyat Madinah. Oleh sebab itu, etika politik yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan teladan dan acuan dalam dinamika politik kontemporer Indonesia. Kegiatan berpolitik tidak sekedar menjadi ajang perebutan kekuasaan tetapi momentum kita untuk mempersuasi dan mengajak rakyat untuk turut andil dalam proyek pembangunan bangsa yang beradab (*civil society*). Kegiatan politik harus disadari dan diimplementasikan dalam kerangka acuan nilai-nilai etika sebab segala aktivitas politik tidak bebas nilai dan harus beroerintasi pada kepentingan umum. Politik tanpa etika akan membentuk rimba kehidupan dimana manusia semasa manusia saling memangsa hanya demi meraih tahta kekuasaan.

REFERENSI

- Bertens, K. (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Dorloh, S & Kamarussalam bin Yusuf. (2015). Wasatiyyah and Islamic Values in Reinforcing Malay Muslim Ethnic Relations: A Case study of Thai Wasatiyyah Institute for Peace and Development in Thailand. *International Journal of Nusantara Islam*, 3(2), pp. 61-68.
- Dwihantoro, Prihatin. (2013). Etika dan Kejujuran dalam Berpolitik. *Politika*, 4(2), 13-21.
- Hanapi, Mohd Shukri. (2014). The Wasatiyyah (Moderation) Concept in Islamic Epistemology: A Case Study of Implementation in Malaysia. *International of Humanities and Social Science*, 4(9), July, pp. 51-62.
- In'amuzzahidin, Muh. (2015). Etika Politik dalam Islam. *Wahana Akademika*, 2(2), pp. 89-106.
- Islam, Tazul and Amina Khatun. (2015). Islamic Moderation in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarship. *International Journal of Nusantara Islam*, 3(2), pp. 69-78.

- Khaeron, Herman. (2013). *Etika Politik: Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Kosim, Mohammad. (2015). Institusi Politik di Zaman nabi Muhammad SAW. *Islamuna*, 2(1), pp. 1-25.
- Lapidus, Ira. M. (2000). *Sejarah Ummat Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Madjid, Nurcholish. (1994). *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (1995). *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Misrawi, Zuhairi. (2009). *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: Kompas.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), pp. 58-70.
- Rubin, R. E. (2004). *Foundation of Library and Information Science*. 2nd Edition. New York: Neal-Schuman Publisher.
- Siswanto. (2013). Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi Interkoneksi dalam Kajian Islam. *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 3(2), pp. 376-409.
- Siti Maryam, et al. (2012). *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI.
- Sjadzali, Munawir. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-PRESS.
- Sofyan, Ayi. (2012). *Etika Politik Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Suwanto. (2017) "Mengukuhkan Ukhwah Kebhinekaan". Retrieved from www.jalandamai.org.
- Syalabi, A. (2003). *Sejarah dan Kebudayaan Islam 1*. Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna.
- Syam, M. Basyir (2015). Kebijakan dan Prinsip-prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad SAW di Madinah (622-632 M), Tinjauan Perspektif Pemikiran Politik Islam. *Kritis: Jurnal Sosial Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), pp. 157-174.
- Watt, W. Montgomery. (1988). *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: P3M.